

Implementasi Kebijakan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kampar

Fadila Arsyad¹, Febri Yuliani²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 15, 2024
Revised September 17, 2024
Accepted September 21, 2024

Kata Kunci:

Implementasi,
Kebijakan,
Pupuk yang bersubsidi
Kampar.

Keywords:

*Implementation,
Policy,
Kampar subsidized fertilizer.*

ABSTRACT

Riset ini di latarbelakangin mangacu pada proses pelaksanaan undangan-undang di mana berbagai aktor setiap tahunnya pemerintah indonesia telah mengalokasi anggaran untuk pupuk yang bersubsidi dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan atau program. Namun pada kenyataanya pemberian pupuk yang bersubsidi masih timbulnya permasalahan pupuk yang tidak tepat sasaran, adanya petani menrima pupuk palsu dan masih adanya birokrasi yang untuk mendapatlan pupuk. Riset ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengadaan dan Pemberian Pupuk Bersubsdi Di kabupaten kampar dan Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengadaan dan Pemberian pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar menggunakan Teori George C. Erward III yang dilihat dari empat aspei yaitu, Komunikasi, sumber daya, diposisi, dan stuktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu interview observasi dan dokumentasi. Kesimpulan riset ini yaitu implementasi kebijakan dalam Pengadaan dan Pemberian pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar sudah berjalan namun dalam pelaksanaanya belum efektif karena masih mendapatkan permasalahan. Hal ini di sebabkan adanya faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan dalam Pengadaan dan Pemberian pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar adanya Miskomunikasi dalam pelaksanaanya, adanya rumitnya pendataan dan ada oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap proses pemberian pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar.

ABSTRACT

The background of this research refers to the process of implementing laws where various actors each year the Indonesian government has allocated a budget for subsidized fertilizer in an effort to achieve policy or program goals. However, in reality the distribution of subsidized fertilizer still causes problems with fertilizer not being on target, there are farmers receiving fake fertilizer and there is still bureaucracy involved in obtaining fertilizer. This research aims to analyze the implementation of the Subsidized Fertilizer Procurement and Distribution Policy in Kampar Regency and identify the factors that influence the Implementation of the Subsidized Fertilizer Procurement and Distribution Policy in Kampar Regency using George C. Erward III's Theory which is seen from four aspects, namely, Communication, Resources, Position, and bureaucratic structures. The method used in this research is a qualitative method which is descriptive in nature. With data collection techniques, namely observation interviews and documentation. The results of this research are that the implementation of policies in the procurement and distribution of subsidized fertilizer in Kampar Regency is already underway, but the implementation is not yet effective because there are still problems. This is caused by inhibiting factors in the implementation of policies in the

procurement and distribution of subsidized fertilizer in Kampar Regency, namely miscommunication in its implementation, the complexity of data collection and there are individuals who are not responsible for the process of distributing subsidized fertilizer in Kampar Regency.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Fadila Arsyad
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau,
Pekanbaru, Indonesia
Email: fadilaarsyad13@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Proses kebijakan merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang dipandang sebagai instrumen administrasi publik, melibatkan aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber data yang diatur untuk secara kolektif melaksanakan kebijakan demi mencapai tujuan. Implementasi sendiri adalah tahap yang dilakukan setelah peraturan hukum disahkan dan dijalankan, sebagai bagian dari proses administrasi yang mencakup desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang berdampak pada pelaksanaan, isi, dan dampak suatu kebijakan [1]. Indonesia adalah negara agraris dengan wilayah yang luas serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Potensi ini menjadikan Indonesia berpeluang menjadi negara agraris terbesar di dunia. Maka, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan memprioritaskan produksi dalam negeri melalui peningkatan produktivitas, perluasan lahan tanam, serta harga yang terjangkau oleh petani.

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan pupuk di Indonesia berkaitan dengan ketersediaan pupuk, sehingga hal ini menjadi fokus pemerintah dalam menyusun kebijakan dengan mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk, terutama bagi petani kecil [2]. Komitmen pemerintah terhadap pemberian pupuk yang bersubsidi telah dilaksanakan sejak era Orde Baru, dan anggaran yang dialokasikan terus meningkat. Namun, sejumlah masalah tetap muncul, seperti kelangkaan pupuk di beberapa daerah, penyelundupan ke luar negeri, kenaikan harga yang melampaui batas harga eceran tertinggi (HET), serta penyelewengan pupuk yang bersubsidi yang dijual sebagai pupuk nonsubsidi di beberapa wilayah [3].

Kebijakan pupuk yang bersubsidi adalah langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dengan cakupan dan target yang terus berkembang setiap tahunnya [3]. Salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu negara, terutama negara berkembang, adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi tujuan utama pembangunan dan merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Ketahanan pangan mengukur sejauh mana akses pangan terjamin bagi seluruh penduduk dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan.

Program pupuk yang bersubsidi yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan beban petani dalam memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi pupuk yang bersubsidi harus mengikuti dasar hukum, persyaratan, serta prosedur yang berlaku. Agar tujuan program pupuk yang bersubsidi tercapai, pengawasan berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk memastikan agar program berjalan efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan, terutama dalam aspek distribusi pupuk yang bersubsidi.

Pemerintah berwenang melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antarinstansi terkait pengawasan pupuk dan pestisida. KPPP ini dibentuk oleh gubernur di tingkat provinsi dan oleh bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Tugas KPPP di kabupaten/kota meliputi pengawasan terhadap pengadaan, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing.

Subsidi pupuk dari pemerintah ini hanya diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak dengan lahan yang tidak lebih dari 2 hektar dan tidak ditujukan bagi perusahaan. Dalam proses distribusinya, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berperan dalam mengawasi distribusi pupuk yang bersubsidi. KPPP tingkat kabupaten/kota menjadi wadah koordinasi antarinstansi yang berkaitan dengan pengawasan pupuk dan pestisida.

Dalam konteks distribusi pupuk, masalah yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pupuk yang bersubsidi sangat rentan terhadap penyimpangan. Kerentanan ini terlihat di Kabupaten Kampar, di mana tindakan penyimpangan terjadi akibat lemahnya pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) setempat.

Dari data terdapat 5 jenis pupuk yang diberikan oleh pemerintah dari subsidi pada kabupaten kampar yaitu pupuk urea harga 2.500/kg, pupuk SP36 hargan Rp 2.500, pupuk Za Rp 2000/kg, Pupuk Npk Rp 2.000/kg, pupuk Organik Rp 700/kg. Pada tahun 2022 yaitu pupuk urea harga 2.500/kg, pupuk SP36 hargan Rp 2.500, pupuk Za Rp 2000/kg, Pupuk Npk Rp 2.000/kg, pupuk Organik Rp 700/kg. Namun realita yang terjadi pada lapangan sering terjadi jauh berbeda, harga subsidi yang diperoleh masih diatas Harga Enceran Tertinggi (HET) yang berlaku Isu kelangkaan pupuk yang bersubsidi dan masalah harga pupuk yang bersubsidi yang mahal masih tetap menjadi berita di setiap awal musim tanam. Isu ini sudah berlangsung lama.

Data menunjukkan beberapa jenis tanaman dalam subsektor pertanian dan tanaman pangan di Kabupaten Kampar, termasuk padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Pada tahun 2014, luas tanam padi sawah mencapai 6.150 hektar dengan luas panen sebesar 5.949 hektar, menghasilkan produksi gabah sebesar 29.665,90 ton dan produksi beras sebanyak 18.784,85 ton, sedangkan konsumsi beras tercatat sebesar 91.547,12 ton. Untuk padi ladang, luas tanam tercatat 3.590 hektar dengan luas panen 2.752 hektar, menghasilkan produksi gabah sebesar 7.658,87 ton dan produksi beras sebesar 4.804,41 ton.

Tanaman jagung memiliki luas tanam sebesar 1.926 hektar dengan luas panen 2.768 hektar, menghasilkan 11.930,77 ton. Sementara itu, tanaman kedelai memiliki luas tanam 506 hektar dengan luas panen 606 hektar dan produksi sebesar 1.525,40 ton. Kacang hijau tercatat memiliki luas tanam 147 hektar dengan luas panen 148 hektar, menghasilkan 303,06 ton. Ubi kayu memiliki luas tanam sebesar 684 hektar dengan luas panen 224 hektar, menghasilkan

produksi sebanyak 13.621,82 ton. Terakhir, ubi jalar memiliki luas tanam 215 hektar, dengan luas panen 224 hektar dan produktivitas sebesar 2.867,46 Kw/Ha.

Sementara mekanisme pengambilan pupuk yang bersubsidi juga telah diatur. Mekanisme ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk yang bersubsidi harus memiliki syarat Dari Kriteria Penerima Pupuk yang bersubsidi. Kriteria penerima pupuk yang bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri.

Sejalan dengan penjelesan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kampar, Ir. Azwan, M.Si, saat memimpin rapat koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), menyatakan bahwa penyediaan pupuk yang bersubsidi seharusnya memudahkan petani dengan harga yang terjangkau. Namun, realitasnya justru berlawanan, di mana pupuk sulit didapat dan harganya tidak sesuai, bahkan terjadi kelangkaan. Ir. Azwan juga menekankan bahwa pupuk yang bersubsidi seharusnya menjadi instrumen efektif untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani. Meski begitu, ada sejumlah masalah serius yang dihadapi terkait implementasi dan pengelolaan program pupuk yang bersubsidi (dikutip dari mediacenter.kamparkab.go.id, 18 Juni 2023).

Pupuk yang bersubsidi merupakan barang yang diawasi, di mana pengadaan dan pemberiannya mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Pemeriksaan terhadap pengadaan, distribusi, dan penggunaannya dilakukan agar kualitas dan efektivitas pupuk tetap terjamin, tidak membahayakan kesehatan manusia, keselamatan, serta menjaga kelestarian lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2021, Kabupaten Kampar menerima alokasi pupuk yang bersubsidi berupa Urea sebanyak 7.885 ton, SP sebanyak 2.021 ton, ZA sebanyak 1.549 ton, NPK sebanyak 9.678 ton, dan pupuk organik sebanyak 962 ton. Kabupaten Kampar memiliki luas tanam sekitar 107 ribu hektar, didukung oleh 2 produsen, 7 distributor, dan 119 pengecer.

Dari data, bahwasanya kebutuhan bahwasanya jumlah petani dan luas tanaman memiliki kebutuhan yang dapat dikatakan banyak untuk daerah Kabupaten Kampar. Dengan memiliki jumlah petani 37, 035 orang/Jiwa dan luas tanaman 155,354,750 (Ha). Sedangkan untuk per Kecamatan, Kebutuhan terbanyak dan luas terbesar terdapat pada Kecamatan Tapung yang mana memiliki luas tanaman 21,850,000 (Ha) dengan jumlah petani 3,684 Orang/Jiwa. Sedangkan kebutuhan dan luas tanaman paling sedikit terdapat pada Kecamatan Bangkinang Kota yang mana memiliki luas tanaman 2,274,000 (Ha) dengan jumlah petani 450 Orang/Jiwa.

Dari data, Ketersedian pupuk yang bersubsidi dapat dikatakan sedikit dengan kebutuhan petani yang terdapat pada tabel 1.1, namun walaupun sedikit setidaknya bisa meringkan beban petani. Di kutip dari mediacenter.kamparkab.go.id, Dinas Pertanian Kabupaten Kampar mengatakan dalam banyak petani yang menghadapi kesulitan mendapatkan akses ke pupuk subsidi yang mereka butuhkan, Kadang pupuk tersebut tidak tersedia di daerah mereka atau mereka harus menghadapi antrean panjang dan birokrasi yang rumit untuk mendapatkan pupuk.

Dalam hal ini pupuk yang bersubsidi yang disediakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar masih kurang mencukupi dan mengakibatkan banyak dari petani yang belum menerima pupuk yang bersubsidi sehingga program pupuk yang bersubsidi kabupaten Kampar yang masih kurang berjalan sesuai dengan tujuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Petani sering kali mendapatkan pupuk yang kurang efektif atau bahkan palsu, yang pada akhirnya merugikan mereka secara finansial dan mengurangi hasil panen. Untuk mengatasi masalah ini, saya percaya beberapa langkah perlu

segera diambil. Pertama, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem distribusi pupuk yang bersubsidi.

2. METODE

2.1 Metode Riset

Peneliti menerapkan metode riset kualitatif. Pada dasarnya, riset kualitatif merupakan kegiatan sistematis yang bertujuan untuk mengeksplorasi teori. Dari fakta di dunia nyata, bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Meskipun riset kualitatif mengakui fakta empiris sebagai sumber pengetahuan, ia tidak menggunakan teori yang ada sebagai dasar untuk verifikasi [4]. Menurut [5] menyatakan bahwa riset kualitatif berfungsi untuk melihat dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dikerjakan dan mempunyai dampak pada tindakan yang dilakukan dalam kehidupan manusia. Secara berangsur-angsur peneliti berusaha untuk memahami fenomenal sosial untuk membedakan, membandingkan, mengelompokkan objek kajian.

Metode riset dibutuhkan agar riset dapat berjalan dengan tepat dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam riset ini, pendekatan yang tepat digunakan dalam riset untuk lebih memahami berbagai pertanda baru yang dibutuhkan dalam ilmu pengetahuan. Interpretasi temuan fakta sinkron adalah bagian dari pendekatan riset deskriptif. Riset deskriptif meneliti hambatan sosial, praktik sosial yang berguna, keadaan atau pengaturan tertentu, termasuk interaksi atau koneksi, aktivitas, sikap, sudut pandang, dan proses, serta efek dari fenomena.

Riset kualitatif juga merupakan salah satu Metode riset yang didasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alami (berlawanan dengan eksperimen). Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil riset kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi [6]. Dengan demikian, peneliti berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan secara detail dan lengkap semua temuan di lapangan sesuai dengan data yang tersedia tentang implementasi kebijakan pemberian dan pengadaan pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar.

2.2 Informan Riset

Dalam riset kualitatif, istilah subjek riset merujuk pada informan, yaitu individu yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti terkait dengan riset yang sedang dilakukan [7]. Menurut Amirin dalam Fitrah [7], informan riset adalah orang atau objek yang ingin diperoleh keterangan mengenai situasi dan kondisi di lokasi riset.

Teknik pemilihan subjek dalam riset ini menggunakan purposive sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel sumber data. Dari pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini bisa berupa orang yang dianggap paling mengetahui informasi yang diharapkan, atau individu yang dapat menjadi sumber informasi yang memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang diteliti. Maka, subjek riset dalam studi ini adalah informan yang dianggap memiliki pemahaman, dapat dipercaya, dan berkompeten [8].

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam riset ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis secara komprehensif. Dari realitas yang terjadi di instansi atau lokasi riset, kemudian dibandingkan dengan konsep dan teori-teori yang relevan untuk

mendukung pembahasan masalah yang diteliti. Setelah itu, peneliti akan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Untuk meningkatkan kepercayaan dan validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi metode.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah bagian dari kajian kebijakan yang berfokus pada tahapan pelaksanaan suatu kebijakan [9]. Di sisi lain, implementasi adalah fenomena yang kompleks yang bisa dimaknai sebagai sebuah proses, keluaran, maupun sebagai hasil akhir [10]. Sebagaimana disebutkan dalam konteks diskusi tentang Implementasi Kebijakan Pengadaan Dan Pemberian Pupuk yang bersubsidi Di Kabupaten Kampar ditemukan beberapa permasalahan atau kondisi yang menyulitkan proses pelaksanaan implementasi program Pengadaan Dan Pemberian Pupuk yang bersubsidi. Untuk mengetahui keberhasilan Implementasi. Riset ini menggunakan teori Implementasi kebijakan oleh Teori George C.

3.1 Implementasi Kebijakan Pengadaan Dan Pemberian Pupuk yang bersubsidi Kabupaten Kampar

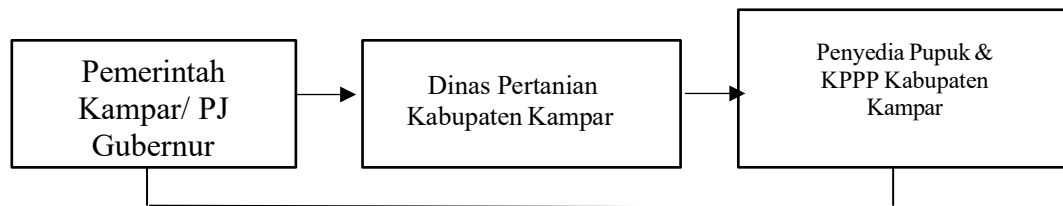
Pelaksanaan kebijakan merupakan proses penerapan aturan dalam rangka mencapai tujuan atau program yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan penyediaan pupuk yang bersubsidi. Kebijakan penyediaan pupuk diterapkan di 21 kecamatan di Kabupaten Kampar, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dengan jumlah mencapai 37.035 orang. Komoditas utama yang dihasilkan di wilayah ini meliputi padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengadaan dan distribusi pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar dapat dilihat dari empat faktor yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Pertama, faktor komunikasi, di mana implementasi akan berjalan dengan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Kedua, faktor sumber daya, yang mencakup konsistensi pelaksanaan program serta keakuratan komunikasi. Ketiga, faktor sikap implementor, yang menekankan bahwa sikap pelaksana kebijakan turut mempengaruhi efektivitasnya. Terakhir, faktor struktur birokrasi, di mana badan pelaksana kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Implementasi kebijakan pengadaan dan pemberian pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar dianalisis melalui keempat indikator ini.

3.1.1 Komunikasi

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi terkait pengadaan dan pemberian pupuk kepada masyarakat. Agar informasi tersebut dipahami dengan benar oleh masyarakat, penyampaian pesan harus dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.

Dimensi komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan dan pemberian pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar sangat dipengaruhi oleh beberapa elemen penting dalam proses komunikasi, seperti cara penyampaian pesan, isi pesan yang disampaikan, media yang digunakan, target penerima pesan, serta dampak yang dihasilkan dari komunikasi tersebut.



Gambar 1. Bentuk Pola Komunikasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar

Proses komunikasi ini dimulai dari PJ Gubernur, yang kemudian akan melaporkannya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar, sambil memastikan konsistensi data serta tanggung jawab dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) jika terjadi kesalahan dalam penyediaan pupuk. Komunikasi ini merupakan hasil diskusi antara PJ Gubernur selaku penyedia dan Dinas Pertanian Kampar. Diskusi tersebut melibatkan pembahasan terkait RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan hasil ketersediaan pupuk yang dihitung Dari luas lahan pertanian sebagai patokan jumlah kebutuhan pupuk. Selanjutnya, PJ Gubernur bersama penyedia pupuk dan KPPP juga berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia sebagai pihak penyedia pupuk. Pupuk yang bersubsidi tersebut kemudian disalurkan kepada para petani. Komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun eksternal, dari tingkat atas hingga bawah, sangat dibutuhkan dalam proses ini. Dari hasil interview disimpulkan jika untuk pola komunikasi komunikasi yang terjadi antar badan pelaksana kebijakan Pengadaan pupuk yang dilakukan oleh dinas kabupaten Kampar melaukan dengan komunikasi semua arah atau pola komunikasi rantai dengan mengadakan rapat atau bermusyawarah. Setelah melakukan rapat dengan Pemkab Kampar pihak Dinas Pertanian dan beberapa yang berdampak terkait pelaksanaan kebijakan Pengadaan pupuk dapat menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang bersubsidi di wilayah Kabupaten Kampar.

Kemudian peneliti melakukan pembahasan terkait bagaimana bentuk komunikasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas kepada petani untuk menginformasikan terkait pengadaan dan pemberian pupuk sebagaimana di ketahui masih ada petani Kampar yang kadang sulit mendapatkan pupuk yang bersubsidi. Komunikasi secara langsung dan tidak langsung kepada para petani Kampar terkait pengadaan dan pemberian pupuk yang bersubsidii dan di benarkan oleh interview kepada salah satu petani di Kampar.

Selanjut mengenai Transmisi komunikasi Komunikasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Agustino, penyampaian komunikasi yang tepat akan berdampak pada implementasi kebijakan yang berhasil. Namun, sering kali terjadi kendala dalam proses komunikasi, seperti kesalahpahaman (miskomunikasi), yang dapat menyebabkan tujuan awal kebijakan mengalami distorsi di sepanjang proses pelaksanaannya. Dari hasil interview dengan staff Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar diatas untuk penyampaian atau pengiriman informasi terkait pengadaan dan pemberian pupuk mereka rapat setiap bulan dengan Distributor dan Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida kabupaten Kampar.



Gambar 2. Rapat Dinas Pertanian Kamar Soal Penyediaan dan Pemberian Pupuk yang bersubsidi

Dari hasil interview yang telah dilakukan, proses transmisi komunikasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kamar dilakukan kepada Distributor dan Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida kabupaten Kamar dengan mengadakan rapat bulanan bersama para staff dinas yang nantinya informasi ini akan di teruskan ke petani.

3.1.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Elemen ini mencakup aktor atau sumber daya manusia, informasi yang dibutuhkan selama implementasi, serta otoritas yang memberikan arahan, termasuk fasilitas pendukung yang mempermudah penerapan kebijakan pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kamar. Maka, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia yang mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Di Dinas Pertanian Kamar, terdapat 14 staf dan 5 anggota dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kamar. Kualitas sumber daya manusia di Dinas Pertanian Kamar akan berhubungan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalisme, serta kompetensi mereka, sedangkan kuantitas mengacu pada apakah jumlah sumber daya manusia tersebut cukup untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran. Seperti soal SDM para pegawai dinas pertanian dalam menerapkan kebijakan pengadaan pupuk, siapa paling bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pupuk yang bersubsidi, berikut jawabannya:

Dari hasil interview dapat diktakan bahwasanya SDM Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kamar dinilai sudah berfungsi dengan baik dan memiliki sumber daya yang memadai. Dari hasil interview, dapat disimpulkan bahwa staf di kantor tersebut cukup memadai untuk melaksanakan tugas penyediaan pupuk yang bersubsidi. Staf diharapkan memahami dengan baik tanggung jawab mereka agar target sesuai kebijakan dapat tercapai. Dalam proses ini, dibutuhkan ketelitian dalam perencanaan serta transparansi dalam pemberian dan penyediaan pupuk, yang semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, fasilitas juga berperan penting dalam implementasi kebijakan penyediaan pupuk. Maka, peneliti ingin mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan dan pemberian pupuk yang bersubsidi di Kamar. Dari interview, kondisi sarana dan prasarana di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kamar dinilai baik. Fasilitas tersebut bisa berupa fisik maupun nonfisik, di mana fasilitas fisik mencakup perangkat keras, sedangkan fasilitas nonfisik meliputi dokumen atau data. Fasilitas ini sangat penting untuk mendukung kelancaran proses implementasi kebijakan penyediaan pupuk dari dinas pertanian kampaaar ke para petani. Namun pendapat layanan

soal fasilitas pelayanan yang diberikan dari para dinas pertanian kebijakan dalam Pengadaan dan Pemberian pupuk bertolak belakang dengan pendapat petani.

Dari keluhan dari petani menyatakan fasilitas tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang mana mengatakan bahwasanya pelayanan yang diberikan oleh para dinas masih kurang untuk sebuah informasi terkait kebijakan dalam Pengadaan dan Pemberian pupuk yang bersubsidi.

3.1.3 Disposisi

Disposisi atau sikap merupakan salah satu indikator utama keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap ini biasanya dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, yang harus mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III, kecenderungan sikap pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga yang memiliki konsekuensi penting bagi efektivitas implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan bersikap positif terhadap kebijakan tersebut, mereka akan cenderung mendukung dan menjalankannya sesuai dengan harapan para pengambil keputusan.

Dari hasil interview, dapat disimpulkan bahwa sikap yang positif, disiplin, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan dan pemberian pupuk yang bersubsidi. Staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini dituntut untuk bekerja dengan teliti, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Disposisi atau sikap yang baik sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan, karena dapat mengurangi hambatan yang ada.

Namun, beberapa masalah dalam sikap muncul terkait pengawasan penyediaan pupuk di tingkat kecamatan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengawasan, yang dapat menimbulkan dampak negatif. Dari interview dengan staf dinas pertanian, diketahui bahwa sikap para aktor yang terlibat dalam penyediaan pupuk yang bersubsidi sangat memengaruhi proses ini. Masalah seperti hilangnya pupuk yang bersubsidi disebabkan oleh kurangnya pengawasan selama proses bongkar muat.

Hasil interview juga menegaskan pentingnya disposisi atau sikap dalam pelaksanaan kebijakan. Kurangnya disiplin di antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan pupuk dapat menimbulkan pandangan negatif dari petani. Sikap kurang disiplin ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan penyediaan pupuk yang bersubsidi.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memiliki dampak besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam proses pemberian pupuk yang bersubsidi hingga sampai ke petani, para pelaksana harus bertindak dengan benar dan bertanggung jawab. Namun, kenyataannya, masalah yang muncul sering kali disebabkan oleh kurangnya disiplin dari pihak yang diberi wewenang untuk menyalurkan pupuk yang bersubsidi.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Ada dua aspek utama dalam struktur birokrasi ini, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Pertama, aspek mekanisme, di mana biasanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah ditetapkan untuk setiap kebijakan yang diimplementasikan. SOP ini berfungsi sebagai panduan bagi pelaksana kebijakan agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Dalam konteks Dinas Pertanian Kabupaten Kampar, mekanisme

tersebut melibatkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) serta staf yang bertanggung jawab untuk memastikan pemberian pupuk kepada kelompok tani sesuai dengan kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi itu sendiri. Struktur yang terlalu panjang dan terfragmentasi dapat mengurangi efektivitas pengawasan serta menambah kompleksitas prosedur, yang pada akhirnya membuat organisasi kurang fleksibel dalam menjalankan tugasnya.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar sudah memiliki struktur birokrasi yang baik untuk melaksanakan kebijakan pengadaan dan pemberian pupuk yang bersubsidi. Dari interview, penerapan SOP dalam proses penyediaan pupuk yang bersubsidi dinilai memberikan hasil yang positif. SOP tersebut mencakup rencana yang telah disusun sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efektif. Namun, penting bagi SOP ini untuk tetap fleksibel agar tidak menimbulkan kendala dalam implementasi kebijakan. Jika SOP terlalu kaku, hal ini dapat berdampak negatif dan menghambat pelaksanaan kebijakan.

3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengadaan dan Pemberian Pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengadaan dan Pemberian Pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar, tentu terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan. Berikut adalah beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Kampar.

3.2.1 Adanya Miskomunikasi

Terjadinya miskomunikasi dalam proses Pengadaan dan Pemberian Pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar disebabkan oleh kurangnya koordinasi, yang mengakibatkan keterlambatan atau kekurangan pasokan dari PT Pupuk Indonesia. Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai hambatan dalam implementasi kebijakan ini, dan dari hasil interview dapat disimpulkan bahwa miskomunikasi masih terjadi antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar dengan PT Pupuk Indonesia. Kurangnya koordinasi mengenai kebutuhan pupuk yang tepat juga masih menjadi masalah. Hal ini menjadi sangat merugikan, terutama bagi para petani, ketika pupuk menjadi langka pada musim tanam.

3.2.2 Rumitnya Pendataan dan Minimnya Kompetensi

Di Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, setiap staf hanya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pemahaman mereka. Kurangnya kompetensi yang dimiliki membuat mereka hanya menjalankan pekerjaan yang dianggap dapat mereka lakukan. Selain itu, proses pendataan yang rumit di tingkat desa, di mana terkadang data yang tidak seharusnya diterima malah masuk atau data yang diterima tidak sesuai, semakin memperburuk situasi.

Dari hasil interview, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kompetensi dari beberapa pegawai menjadi salah satu alasan bagi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif, berdampak negatif pada implementasi kebijakan. Ditambah lagi, kesulitan dalam sistem pendataan membuat proses pengawasan menjadi lebih rumit, yang mengakibatkan banyak waktu terbuang tanpa hasil yang optimal.

3.2.3 Adanya Oknum yang Tidak Bertanggung Jawab

Sebagai Dinas Pertanian, pemberian pupuk yang bersubsidi merupakan langkah untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini harus dilakukan dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pemberian yang buruk dapat mengakibatkan kerugian bahkan kegagalan dalam menerapkan kebijakan. Dari fenomena yang ada, pemberian pupuk yang bersubsidi menghadapi beberapa masalah, yang akan dijelaskan oleh Distributor Pupuk yang bersubsidi Kabupaten Kampar.

Dari interview diketahui bahwa faktor eksternal dan internal dapat memengaruhi proses pemberian pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar. Hal ini dapat berujung pada kegagalan dalam pemberian. Dinas Pertanian Kampar sebagai pelaksana kebijakan bertanggung jawab terhadap beberapa aspek tersebut, tetapi hal ini juga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Dari interview tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Pengadaan dan Pemberian Pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida memiliki tanggung jawab penuh. Jika terjadi penyalahgunaan dalam proses pemberian, maka Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Maka, dibutuhkan kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi dari setiap anggota dinas yang diberi wewenang dalam kebijakan pemberian pupuk yang bersubsidi.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengadaan dan pemberian pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar sudah berlangsung, namun masih belum efektif karena berbagai permasalahan yang ada. Beberapa aspek yang memengaruhi termasuk komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam hal komunikasi, Dinas Pertanian Kabupaten Kampar telah melakukan komunikasi secara terstruktur dan melaksanakan tugasnya dengan baik, mulai dari perencanaan hingga penyediaan. Dari segi sumber daya, Dinas Pertanian memiliki sejumlah staf dengan kemampuan masing-masing, dan mereka bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Terkait disposisi atau sikap, Dinas Pertanian memiliki kewenangan untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang bersubsidi di seluruh daerah Kabupaten Kampar, terutama dalam proses pemberian. Dari aspek struktur birokrasi, Dinas Pertanian memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan aktivitas mereka didasarkan pada SOP. Namun, dalam hal sikap atau disposisi, masih terdapat kurangnya disiplin di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian, yang mengakibatkan permasalahan dalam penyediaan pupuk yang bersubsidi.

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini meliputi miskomunikasi dalam proses pengadaan dan pemberian pupuk yang bersubsidi. Selain itu, kompleksitas pendataan dan minimnya kompetensi juga menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan. Terakhir, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab menunjukkan bahwa baik faktor eksternal maupun internal dapat memengaruhi proses pemberian pupuk yang bersubsidi di Kabupaten Kampar..

REFERENSI

- [1] Redhani, R., & Satria, B. (2020). Implementasi Kebijakan Program Agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 141-158

- [2] Prihantini, C. I., & Lutfiyanto, L. (2019). Analisis Persepsi Stakeholder Distribusi Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) Pupuk di Kabupaten Pamekasan. *Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, 26(3), 294-307.
- [3] Jamil, A. (2022). Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk yang bersubsidi untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 20(2), 161-172.
- [4] Rukajat. (2018). Pendekatan Riset Kualitatif (Qualitative Research Approach). Yogyakarta: Deepublish.
- [5] Anggito, Albi. Setiawan, Johan. (2018). Metodologi Riset Kualitatif. Sukabumi Jawa Barat : CV Jejak.
- [6] Sugiyono. (2016). Metode Riset Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23rd ed.). Bandung: Alfabeta, CV
- [7] Fitrah, M. (2018). Metodologi Riset: Riset Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- [8] Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Riset Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- [9] Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- [10] Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus kompratif)*, Yogyakarta : CAPC (Center Of Academic Publishing Service)